

Efektivitas Pembiayaan Dari Koperasi Dalam Peningkatan Kapasitas Usaha UMKM Studi Pada UMKM Di Kota Bandar Lampung

Eka Travilta Oktaria dan Pipit Novila Sari
Fakultas Bisnis, Universitas Mitra Indonesia
Email:., Ekatravilta@umitra.ac.id dan Pipit842@gmail.com
Jl. ZA Pagar Alam, No.7 Bandar Lampung

Abstrak

Koperasi merupakan suatu sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM karena mengingat masih minimnya lembaga keuangan seperti Bank yang melirik UMKM sehingga sangat ditentukan oleh bagaimana pembiayaan yang didapatkan dalam peningkatan usaha tersebut. Bagaimana pengembangan usaha, sumberdaya manusia dan modal yang dimiliki menjadi efektif dan efisien tanpa adanya pembiayaan yang tepat. Hal-hal tersebut di atas menjadikan UMKM perlu penanganan yang berbeda dibandingkan dengan penanganan usaha lain dalam sektor pembiayaan. Sebagai suatu usaha, UMKM memiliki dua ciri penting: Pertama selalu melibatkan barang dalam volume besar dan proses produksi memiliki risiko yang relatif tinggi seperti Bahan Baku. Kedua ciri khas ini muncul karena UMKM menyerap tenaga kerja dalam satu atau beberapa tahapnya dan memerlukan ruang untuk kegiatan lainnya dalam produksi maupun operasional. Selain itu minimnya pembiayaan pun menjadi kendala jalannya UMKM dalam pengembangan usaha dan serta peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi salah satu permasalahan klasik yang masih belum terjawab. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui pendekatan secara normatif melalui uji sampel dan data Koperasi dan UMKM sebagai data utama yang selanjutnya diolah secara kualitatif berdasarkan data yang ada.

Kata Kunci : Efektivitas, Pembiayaan, Koperasi, UMKM.

1. Latar Belakang

UMKM adalah salah satu usaha yang saat ini mendominasi di Indonesia, oleh karenanya pembangunan ekonomi saat ini ditopang oleh UMKM sebagai pahlawan ekonomi. Sungguh ironis, tatkala negara tetangga dengan luas daerah yang tidak sebanding dengan Indonesia mampu mengembangkan UMKM lebih baik dan dapat mensejahterakan masyarakatnya karena lebih dominan banyaknya pelaku usaha di negara tersebut berbeda dengan Indonesia sebagian besar pelaku usaha hanya terserap 4% dari total 271 juta jiwa.

UMKM banyak menggunakan bahan baku industry kebanyakan dari dalam negeri maupun luar negeri, serta untuk mengelola usahanya membutuhkan tenaga sumber daya manusia karena produksi yang digunakan UMKM dominan masih menggunakan tahap manual. Penyerapan tenaga kerja saat ini lebih banyak terserap oleh UMKM dalam beberapa sector bidang seperti insdustri, manufaktur, pangan dan lainnya.

Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang di sektor UMKM, UMKM menyumbang hampir 58% dari PDB Indonesia pada Tahun 2018. Sejarah Indonesia sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor UMKM, karena sektor - sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2018, UMKM di Indonesia menyediakan lapangan kerja sekitar 90% penduduk dimana usaha mikro menyumbang sekitar 70% dari total penyerapan tenaga kerja.(Sumber : BPS)

UMKM berupaya untuk melanjutkan kelangsungan hidup seperti memnuhi kebutuhan sehari-hari melalui produk lokal yang dibuat dari proses produksi dalam negeri. Dalam UMKM, terdapat perhitungan untuk memperoleh suatu keuntungan yang akan diterima. Perhitungan tersebut seperti

analisis biaya, pendapatan, BEP (Break Event Point), dan R/C ratio. Dimana perhitungan-perhitungan itu digunakan agar orang yang melakukan kegiatan produksi mengetahui biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan untuk UMKM, apakah biaya-biaya tersebut melebihi atau memenuhi target keuntungan yang diinginkan.

Selain itu beragam faktor permasalahan yang ada menjadi kendala berjalannya UMKM menurut data BPS hampir 100% adalah pembiayaan yang sulit didapatkan, 70% Bahan Baku, dan 10% kegiatan pemasaran yang belum memadai. Dalam mengembangkan UMKM ke arah yang lebih efisien sangat erat kaitannya dengan yang namanya modal, karena UMKM membutuhkan modal untuk mengoptimalkan usaha mulai dari pembelian bahan baku yang baik, penggunaan tenaga kerja yang sesuai, Pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional sesuai SOP. (BPS)

UMKM memiliki ciri khas tersendiri yaitu karakteristik usaha informal yang sangat fleksibel. Yakni penggunaan modal dilakukan dari awal usaha merupakan dana pribadi. Dalam menyiasati hal ini tentunya UMKM haruslah menggunakan penyisihan uang hasil penjualan untuk keperluan produksi (menabung). Namun bagi UMKM subsisten hal tersebut sulit dilakukan mengingat hasil yang diperolehnya dari penjualan itu sendiri sangat sedikit. Untuk menyiasati masalah tersebut, maka pemerintah melakukan usaha untuk menjembatani pemberian pembiayaan untuk UMKM melalui Koperasi tidak hanya modal namun bahan baku dan penjualan juga dapat dilakukan melalui Koperasi pada akhirnya untuk mensejahterakan pelaku usaha dan masyarakat.

Pembiayaan dari Koperasi sebagaimana halnya dengan pemberian pembiayaan lainnya diperuntukkan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, sehingga perlu ditunjang dengan UMKM sebagai anggota bagi koperasi. Hal ini berfungsi sebagai penghubung dana dari luar ke dalam sektor UMKM (UMKM Finance Approach), dengan demikian pembiayaan UMKM adalah sekedar pinjaman yang diberikan untuk kegiatan produksi serta penjualan (Eddy R,2005).

Dalam menjalankan kegiatannya bukan saja sukses dalam penyaluran pembiayaan saja, tetapi juga harus meliputi sukses yang lainnya yaitu dalam hal pemanfaatan dan pengembalian dana yang berasal dari koperasi. Selama ini program skim koperasi yang ada lebih mengedepankan penyaluran melalui lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan beragam kegiatan mulai dari koperasi bahan baku, koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran yang di inisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UMK sebagai langkah bagi UMKM dalam menjawab permasalahan pembiayaan sampai dengan akses penjualan. Hal demikian tentunya akan memberikan potensi minimnya kegagalan suatu program. Mengingat program tersebut berjalan secara komprehensif (dalam pemanfaatan dan pengembalian kredit) dan keterlibatan lembaga-lembaga yang ada tidak hanya sebatas penyaluran dana, terbukti dengan adanya koperasi sebagai pembiayaan, koperasi pengadaan bahan baku dan koperasi penjualan yang dibayar dimuka kemudian sangat berdampak bagi peningkatan kapasitas usaha bagi UMKM. Setelah pembiayaan tersalurkan, keberadaan koperasi tersebut sebagai tempat untuk melakukan pembinaan usaha. Dengan demikian perlu juga diperhatikan kelayakan dari Koperasi yang akan terlibat, supaya UMKM tersebut benar-benar capable menuju Bankable.

2. Kajian Pustaka

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai Pembiayaan Koperasi bagi UMKM :

1. Analisis Efektivitas Pemberian Pinjaman Program Pembiayaan UMKM Oleh Koperasi Oleh Hadi Ismanto & Tohir Diman yang membahas mengenai Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pinjaman di UJKS Mitra Usaha ini terdiri dari sepuluh faktor/variabel yang diklasifikasikan ke dalam tiga karakteristik, yaitu karakteristik personal, karakteristik usaha dan karakteristik pinjaman.
2. Analisis Strategi Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Dana Bergulir pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Oleh Adi Trisnojuwono, Aida Vitayala S. Hubeis, dan Eko Ruddy Cahyadi yang membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja dana bergulir dan merumuskan strategi efektif untuk meningkatkan kinerja dana bergulir LPDBKUMKM.

3. Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil Dan Mikro (UKM) Oleh Fatimah Dan Darna yang membahas mengenai peranan koperasi masih sangat rendah terhadap pemberdayaan permodalan UKM, ada banyak faktor yang menyebabkan rendahnya peran koperasi terhadap kemajuan UKM di kota Depok; 1) masih sedikitnya jumlah koperasi dibandingkan jumlah UKM (1:1755), 2) masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya berkoperasi, 3) rendahnya kemampuan SDM koperasi baik dari sisi pemahaman tentang manfaat berkoperasi maupun dalam pengelolaan manajemennya; 4) adanya stigma negative dari masyarakat yang menimbulkan kurangnya kepercayaan dari pelaku UKM terhadap koperasi. Berbagai faktor tersebut telah menyebabkan pelaku UKM di kota Depok sedikit sekali yang tergabung dalam wadah koperasi sehingga koperasi masih rendah peranannya dalam membantu pengembangan UKM melalui penyediaan modal usaha.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas peneliti melakukan penelitian orisinal mengenai efektivitas pembiayaan dari koperasi bagi peningkatan kapasitas usaha UMKM studi pada UMKM di Kota Bandar Lampung.

Pengertian Koperasi

Secara etimologi istilah 'koperasi' berasal dari kata 'co-operation' yang berarti kerja sama. Jadi, setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab dalam operasional koperasi serta memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi merupakan salah satu penyokong ekonomi kerakyatan di Indonesia, koperasi merupakan alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha melalui skema channeling dan executing. Selain itu koperasi memiliki peran penting bagi pembangunan ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip kekeluargaan sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Koperasi adalah terdiri atas produsen-produsen kecil yang tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan saling tukar jasa secara kolektif dan menanggung risiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.

Adapun tujuan Koperasi adalah sebagai berikut yaitu Untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, Untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi, Membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, Koperasi juga berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional.

Setiap badan atau organisasi pasti memiliki fungsi. Begitu juga dengan koperasi. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, fungsi koperasi adalah : Membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud, Koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan masyarakat, Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional di mana koperasi menjadi fondasinya, Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pengertian UMKM

UMKM adalah istilah yang tidak lagi asing terdengar dimana istilah UMKM sudah sering diucapkan dimanapun berada. Selain itu pemerintah telah menetapkan definisi UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM merupakan usaha rumahan dengan skala rumah tangga, penggolongan UMKM lazimnya menurut Modal usaha dan omset usaha dari pelaku usaha UMKM.

Sedangkan usaha yang tidak masuk kedalam penggolongan usaha UMKM biasanya masuk kedalam penggolongan badan usaha yang cakupannya lebih luas seperti PT persero. Karena mengingat jumlah modal serta omset usaha yang cukup besar sehingga dikategorikan sebagai usaha besar. Ditanah air UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.

Mengingat UMKM merupakan pahlawan nasional bagi Indonesia ditengah terjadinya badai krisis seperti Tahun 1998 dan 2008. Selain itu juga UMKM memiliki karakteristik usaha yang fleksibel dan bersifat non formal yang membuat UMKM menjadi usaha yang selalu dapat tumbuh dan berkembang ditengah kesulitan ekonomi. Meskipun modal yang ada pada UMKM merupakan modal yang berasal dari pribadi atau bersifat modal sendiri seringkali mendapatkan kesulitan untuk dapat meningkatkan kapasitas karena masalah klasik yaitu pembiayaan.

Peningkatan kapasitas usaha UMKM melalui Koperasi merupakan salah satu alternatif bagi UMKM untuk dapat terus menjalankan kegiatan usahanya. Karena mengingat keterbatasan modal yang menjadi konsentrasi utama sehingga peran koperasi dalam hal pembiayaan telah terjawab dimana koperasi dapat memberikan pembiayaan kepada para anggota yaitu UMKM yang terlibat menjadi anggota dengan begitu maka UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha sehingga bisnisnya dapat menjadi lebih besar lagi. (Lukman, 2018).

3. Metode Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian

Rancangan menyeluruh diperlukan, agar dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Terutama rancangan menyeluruh tentang urutan kerja penelitian dalam bentuk rumusan operasional menggunakan metode ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai suatu situasi sosial.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk data primer menggunakan Identifikasi isi dengan metode studi lapangan, dimana metode ini digunakan dalam rangka memperoleh data primer, yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan mengkajinya.

Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong, Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) yaitu serangkaian metode untuk menganalisa isi segala bentuk komunikasi dengan mereduksi seluruh isi komunikasi menjadi serangkaian kategori yang mewakili hal-hal yang ingin diteliti.

4. Hasil dan Pembahasan

Pembiayaan Koperasi Bagi UMKM

Salah satu tujuan utama negara ini adalah untuk memberikan kesejahteraan rakyat Karena kebanyakan orang hidup dengan melalui bisnis yang mendominasi adalah usaha Mikro dan kecil saat ini. Sebenarnya adalah aturan angka UMKM dan penyerapan tenaga kerjanya tidak Jelaskan hanya kepentingannya UMKM, tetapi juga menggambarkan ancaman Sangat buruk karena terjebak Kebanyakan orang menjalani hidup yang sulit Hampir 70 tahun Independen situasi ini belum membaik secara signifikan karena waktunya habis serta Perlu kerja keras untuk meningkatkan kapasitas Usaha kecil dan menengah, terutama pemerintah.

Masalah yang dihadapi UMKM secara substansial dan intensitasnya sangat bervariasi di antara satu dengan lainnya. Masalah yang dihadapi UMKM tersebut dapat berbeda pula di antara satu daerah dan

daerah lain, antara pedesaan dan perkotaan, atau antar sektor, dan lain sebagainya yang terkait pula dengan ciri masing-masing UMKM. Jadi masalah yang dihadapi UMKM sebenarnya lebih bersifat spesifik dan individual masing-masing. Salah satu masalah yang paling dominan diantara pelaku usaha UMKM adalah permasalahan pembiayaan yang selalu menjadi permasalahan klasik yang selalu menerpa para pelaku usaha UMKM pada khususnya sehingga para pelaku usaha UMKM menjadi sulit dan bahkan kesulitan untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya bahkan usaha besar dalam hal memasarkan produk lokal hasil buatan daripada UMKM di Indonesia.

Ketidakberdayaan UMKM semakin terbatas dalam kapasitas pembiayaan. Infrastruktur tidak hanya terbatas pada prasarana dan sarana fisik saja, melainkan mempunyai fungsi yang lebih penting lagi yaitu fungsi pembiayaan dalam rangka peningkatan kapasitas usaha agar semakin berkembang. Keinginan pemerintah menciptakan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui perkuatan UMKM sudah diikrarkan sejak awal masa kemerdekaan. Untuk itu telah dilakukan berbagai program pembangunan, walaupun sampai sekarang ini masih ada sekelompok masyarakat yang tergolong miskin. Belum optimalnya keberhasilan pembangunan ekonomi dari satu rezim ke rezim yang lain, nampaknya tidak terlepas dari konsepsi dasar pembangunan yang belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat. Indikator dari kondisi tersebut antara lain terlihat dari semakin menyurutnya peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi, bahkan sebagian ekonom sekarang malah mempertanyakan apakah koperasi merupakan alternatif kelembagaan untuk memberdayakan UMKM, atau hanya merupakan salah satu solusi.

Pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada pelaku UMKM, baik secara langsung maupun melalui perantara, merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi dan peran Koperasi sebagai instrumen kebijakan pemerintah di bidang pembiayaan kepada UMKM, meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, agar dapat meningkatkan usaha dan daya saing produk yang akan dihasilkan.

Dalam membahas peluang koperasi untuk menjadi lembaga alternative pemberdayaan UMKM juga perlu dikaji hubungan antara koperasi dengan anggotanya yang UMKM. Melihat pentingnya koperasi bagi pengembangan UKM di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu manajemen pembiayaan koperasi yang anggotanya sebagian berasal dari pelaku UMKM juga harus menjadi pertimbangan karena dalam hal ini para UMKM memerlukan modal untuk melakukan Kegiatan Produksi atau bahkan pengelolaan pemasaran sehingga dengan adanya manajemen khusus untuk anggota UMKM dapat menggerakkan keadaan perekonomian disuatu daerah tertentu sehingga tidak ada lagi kekurangan modal untuk infrastruktur atau pengembangan sektor UMKM di daerah.

Dampak penting dari akses pembiayaan khususnya daerah pedesaan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia melalui penggunaan teknologi baru yang menambah tingginya produktivitas, peningkatan pendapatan, konsumsi dan kalori serta *human capital* dengan menyediakan pendidikan yang lebih baik.

Peningkatan Kapasitas UMKM Melalui Koperasi

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja (www.smeccda.com).

Pola pembangunan ekonomi yang telah gagal dimana bertumpu pada konglomerasi usaha besar telah mendorong para perencana ekonomi untuk mengalihkan upaya pembangunan dengan bertumpu pada pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM). Sektor KUMKM telah terbukti tangguh ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998, dan telah dipromosikan serta dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia. Kontribusi KUMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2010 mencapai 53,6 persen dan pada tahun 2011 meningkat 17,76 persen dari tahun 2010 (BPS Indonesia, 2011). Jumlah Koperasi dan UMKM per tahun 2010 mencapai 99,98 persen sedangkan perusahaan besar hanya 0,02 persen. Namun dalam perkembangannya pengembangan koperasi dan usaha kecil masih menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan (Kuncoro, 2000).

Mencermati banyaknya jumlah pelaku UKM yang mencapai 50,76 juta lebih, sangat potensial untuk mengatasi kemiskinan di negeri ini. Jumlah mereka sesuai data BPS pada 2008 mencapai 31,5 juta jiwa dari jumlah penduduk. Bukan tidak mungkin jumlah tersebut akan berkurang dan bahkan habis apabila pemerintah serius memberdayakan UKM. Asumsinya apabila mereka mampu tumbuh dan berkembang, maka dipastikan membutuhkan tenaga kerja. Seandainya satu unit usaha mikro memerlukan dua tenaga kerja saja, maka akan tertampung sebanyak 100 juta orang lebih. Berarti jumlah pengangguran yang sesuai dengan data di Kementerian Daerah Tertinggal berjumlah sekitar 9,2 juta orang akan terus berkurang. Dengan demikian kemiskinan perlahan-lahan akan lenyap dari bumi zamrud khatulistiwa. Mengingat tidak ada lagi orang usia produktif yang menganggur, sehingga kesejahteraan yang didambakan semua pihak akan tercapai (Bappenas).

Sesungguhnya selama ini telah banyak kebijakan, program dan upaya dari berbagai pihak utamanya pemerintah. dalam pembiayaan/kredit mikro khususnya untuk UMKM. Belum banyak UMKM yang masuk dan menjadi anggota daripada koperasi di beberapa daerah menjadi salah satu faktor gagalnya koperasi yang merupakan salah satu alternatif bagi UMKM baik dalam menyediakan modal usaha melalui pola chaneling dan executing maupun dengan pola kemitraan bahan baku dan bahan lainnya dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk dapat meningkatkan jumlah produksinya agar terus dapat berkembang dan agar tetap menjalankan kegiatan usahanya dan terus dapat menumbuhkan usaha agar semakin besar dan bertumbuh setiap tahunnya. Koperasi sangat efektif terutama dalam hal pembiayaan UMKM namun masih banyak UMKM yang belum tertarik untuk dapat menjadi anggota pada koperasi di setiap daerah sehingga mengakibatkan minimnya peningkatan kapasitas usaha bagi UMKM.

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan jika pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi merupakan salah satu alternatif pembiayaan atau permodalan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha UMKM sehingga dapat dikatakan pembiayaan yang diberikan oleh koperasi sangatlah efektif dan memiliki persyaratan yang relatif sangat terjangkau oleh seluruh para pelaku UMKM guna dapat menumbuhkembangkan usahanya agar terus dapat berjalan sehingga UMKM dapat terus meningkatkan kapasitas usahanya dan tidak lagi kesulitan dalam aspek apapun terutama dalam aspek pembiayaan. dengan penguatan kapasitas SDM dan permodalan pelaku UMKM juga akan membuat mereka lebih punya daya tahan dan adaptasi serta juga mampu menyesuaikan bisnisnya dengan kondisi yang tidak terelakan. Dengan mengutamakan kebijakan pada upaya memperkuat SDM dan permodalan pelaku UMKM, baru selanjutnya masalah-masalah lainnya, maka diyakini akan memudahkan UMKM naik kelas skala usahanya yang pada gilirannya lebih signifikan bagi pembangunan yang berkualitas yakni dengan pertumbuhan lebih merata disertai penguatan daya saing ekonomi bangsa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari penelitian berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Penelitian atas dasar analisis dan masalah UMKM Dari perspektif pembiayaan dapat membuat meningkatnya permintaan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah sehingga dapat meningkatkan kapasitas sektor formal dan cara tertentu yaitu Perlu sinkronisasi sistem pembiayaan koperasi agar lebih efektif dengan beberapa pola seperti pola executing ataupun channeling melalui kualifikasi Prosedur dan persyaratan minimal sehingga UMKM dapat dilaksanakan dengan tertib untuk membuat Peluang peningkatan UMKM. Dalam ukuran yang sama Pembiayaan koperasi dapat dikatakan sangat efektif (penggunaan, Kualitas dan kesejahteraan) sehingga tetap dibutuhkan untuk terus mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah terutama dalam peningkatan kapasitas agar UMKM terus dapat naik kelas.

Daftar Pustaka

- Adi Trisnojuwono, Aida Vitayala S. Hubeis, dan Eko Ruddy Cahyadi, Analisis Strategi Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Dana Bergulir pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Manajemen IKM, September 2017 (178-186), Vol. 12 No. 2, ISSN 2085-8418, <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/>.
- Eddy Rismanda Sembiring. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial : Study Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi VII.
- Fatimah dan Darna, peranan koperasi dalam mendukung permodalan usaha kecil dan mikro (UKM), jurnal ekonomi dan bisnis, vol 10, no. 2, desember 2011 : 127-138.
- Hadi Ismanto & Tohir Diman, Analisis Efektivitas Pemberian Pinjaman Program Pembiayaan UMKM Oleh Koperasi, Jurnal Economia, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2014
- Kuncoro, Mudrajad. (2000). Usaha Kecil di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan. Makalah. Disajikan dalam Studium Generale dengan topik "Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil di Indonesia" di STIE Kerja Sama Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 2000.
- Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi). Bandung: PT Rosdakarya Offset. 2005.hlm 103
- Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, Aspek Hukum dan Fungsi Koperasi sebagai perwujudan perekonomian, CV. Pustaka At-tirmidzi, Lampung, 2018
- www.BPS.go.id diakses pada tanggal 1 Oktober 2020
- www.BAPENAS.com
- www.smecda.com